

BAB III

SEJARAH INTEGRASI DAN INSTITUSI UNI EROPA

Setiap negara di dunia memiliki kepentingan yang harus dipenuhi. Kepentingan itu bisa dicapai dengan cara saling bekerja sama satu sama lain. Bentuk kerja sama dapat diwujudkan dengan membentuk unit-unit organisasi. Selama ada kesepakatan dan perjanjian yang mengatur jalannya kerja sama, maka tujuan yang dicapai akan maksimal. Kerjasama saat ini yang sangat banyak ditemui adalah kerjasama di bidang ekonomi yang tidak terlepas di dalamnya isu politik, pertahanan dan keamanan, lingkungan, dan sosial.

A. Integrasi Uni Eropa

Proses integrasi Uni Eropa pada awalnya dimulai pada bulan Mei 1950 ketika Perancis mengusulkan untuk terciptanya "*The first concrete Foundation of a European Federation*". Negara-negara Eropa pasca perang dunia I & II berusaha untuk membangun kembali eropa dengan tujuan agar tidak terjadi perang lagi sehingga dapat menciptakan perdamaian. Untuk itu salah satu menteri Perancis yaitu Robert Schumann atas usul dari Jean Monnet kemudian membentuk kerjasama batu bara dan baja diantara Negara-negara Eropa. Negara-negara yang tergabung dalam *European Coal and Steel Community (ECSC)* adalah Jerman, Belanda, Belgia, Luxemburg, Italia, dan Perancis. Inggris pada saat itu tidak mau bergabung karena takut industri baja dan batu bara nya berada di bawah pengawasan atau kontrol dari ECSC.

Komunitas diatas masih mempunyai badan atau lembaga eksekutif masing-masing, baru pada tahun 1967 melalui "*Treaty of Merger*", Uni Eropa (UE) mempunyai lembaga sendiri yang mengatur kegiatannya. Misalnya *Executives of the European*. Dari sinilah kemudian UE mempunyai *European Council* (Dewan Uni Eropa), dan *European Commission* (Komisi Eropa),

yang kemudian diperkuat dengan “*Single European Act*” pada tahun 1987. Pada tahun 1997 ada perjanjian “*Treaty of Amsterdam*”. Perjanjian ini ditandatangani pada tahun 1997 dan mulai diberlakukan pada tahun 1999. Kemudian pada tahun 2001 ada perjanjian Nice atau “*Treaty of Nice*”. Kedua perjanjian tersebut pada dasarnya berisi penghormatan terhadap HAM, migrasi dan penghormatan terhadap lintas batas serta peningkatan lapangan kerja.

Sejarah berdirinya Uni Eropa tidak lepas dari adanya proposal Prancis pada tahun 1950 yang dikenal dengan *Schuman Plan* yang isinya mengajukan pengaturan pasar bersama batu bara dan besi baja di bawah badan pengawas yang independen di Eropa. Rencana Prancis ini diterima baik oleh negara-negara di Eropa seperti Jerman, Italia, Belgia, Belanda, dan Luksemburg. Kesepakatan di antara keenam negara Eropa tersebut secara resmi ditandatangani pada tanggal 18 April 1951 dengan terbentuknya *European Coal and Steel Community* (ECSC) atau Masyarakat Batu Bara dan Baja Eropa. Adanya ancaman perang dingin antara Blok Barat dan Blok Timur mendorong keenam negara pendiri ECSC untuk lebih memperluas kerjasamanya di bidang ekonomi. Pada tanggal 25 Maret 1957 ditandatangani Traktat Roma dan Traktat pembentukan *European Atomic Energy Community* (EURATOM) atau Masyarakat Energi Atom Eropa yang merupakan dasar hukum bagi pembentukan *European Economic Community* (EEC) atau Masyarakat Ekonomi Eropa.¹

Setelah kedua traktat tersebut di atas (Traktat Roma dan Traktat EURATOM) diratifikasi oleh keenam parlemen negara ECSC, pembentukan Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) secara resmi disahkan dan mulai berlaku

¹ Banyu Perwita dan Yanyan M. *Op Cit*, hal. 111

sejak tanggal 1 Januari 1958 dengan tujuan membangun pasar bersama yang dicapai melalui penghapusan berbagai tarif bea masuk dalam perdagangan di antara keenam negara tersebut (Prancis, Jerman, Belgia, Luksemburg, Belanda, dan Italia). Pada tanggal 8 April 1965 keenam negara anggota MEE menandatangani suatu traktat yang menyatukan para eksekutif di ECSC, EEC, dan EURATOM. Setelah diratifikasi MEE berubah menjadi *European Community* (Masyarakat Eropa) sejak 1 Juli 1967. Pada tanggal 7 Februari 1992 *Traktat Maastricht* ditandatangani dan secara resmi memberlakukan Pasar Tunggal Eropa (*European Single Market*) pada tanggal 1 Januari 1993.²

Pergantian nama “Masyarakat Uni Eropa” menjadi “Masyarakat Eropa” menjadi pilar atau dasar terbentuknya Uni Eropa. Uni Eropa bertransformasi dari badan perdagangan menjadi sebuah kerjasama ekonomi dan politik. Pada dasarnya, tujuan terbentuknya Uni Eropa adalah :

1. Menciptakan kewarganegaraan Eropa (hak-hak dasar, kebebasan bergerak, hak-hak sipil dan politik)
2. Menjamin kemerdekaan, keamanan dan keadilan (kerjasama dalam bidang peradilan dan urusan dalam negeri)
3. Mendorong kemajuan ekonomi dan sosial (pasar tunggal, euro-mata uang bersama, penciptaan lapangan kerja, pembangunan wilayah dan pelestarian lingkungan)
4. Menegaskan peranan Eropa di dunia.

Perubahan nama Masyarakat Eropa menjadi Uni Eropa merupakan implikasi dari terjadinya peningkatan jangkauan kerjasama, dari kerjasama

² Ibid, hal. 112-115

ekonomi ke bidang-bidang politik luar negeri. Dalam perjanjian Maastricht, Uni Eropa terdiri atas tiga pilar, yaitu;³

- a. Pilar ekonomi; Pasar Tunggal Eropa menuju Uni Ekonomi dan Moneter (*Economic and Monetary Union/EMU*).
- b. Pilar politik; berdasarkan pada kebijakan luar negeri dan keamanan bersama (*Common Foreign and Security Policy/CFSP*).
- c. Pilar sosio-hukum; menyangkut peradilan dan masalah dalam negeri (*Justice and Home Affairs/JHA*).

Pembentukan Perjanjian Maastricht merupakan implementasi dari keinginan yang termaktub dalam pembukaan Perjanjian Paris sebagai dasar ECSC:

*Resolved to substitute for age-old rivalries the merging of their essential interests: to create, by establishing in economic community, the basis for a broader and deeper community among peoples long divided by bloody conflicts; and to lay the foundations for institutions which will give direction to a destiny henceforward shared...*⁴

Sama halnya dengan Perjanjian Paris, Perjanjian Roma menyebut tujuan akhir sebagai: “*Referring to a shared determination, to establish the foundation of an ever closer union among the European peoples*“.⁵

Berdasarkan pembukaan perjanjian tersebut, secara implisit cita-cita Masyarakat Eropa untuk berintegrasi sebenarnya telah ada sejak pembentukan Masyarakat Ekonomi Eropa (ECSC dan EURATOM). Namun, selain itu yang mendorong terbentuknya integrasi Eropa yang bersifat

³ Meita Istianda. 2000. *Aspek Ekonomi dan Aspek Politik dalam Perjanjian Maastricht*. Thesis-S2, Universitas Indonesia, Jakarta, hal.31-32

⁴ Ibid

⁵ Ibid hal.32

supranasional adalah krisis internal dan eksternal yang melanda negara-negara Eropa pada waktu itu. Krisis internal tersebut adalah melemahnya sektor bisnis. Di awal tahun 1980-an perusahaan-perusahaan Eropa menurun daya saingnya dibanding Amerika Serikat dan Jepang. Produk Eropa telah kehilangan pasar, terutama di sektor-sektor yang pertumbuhannya pesat, dimana skala ekonomi tidak bisa diserap pada tingkat nasional.

Kelemahan yang melanda Eropa juga disebabkan turunnya produksi tekstil, jam, motor, kapal dimana tadinya Eropa unggul selama berabad-abad. Kelemahan industri Eropa tersebut mengakibatkan menurunnya daya saing produk Eropa di kawasannya sendiri. Selain itu, di Eropa terjadi peningkatan pengangguran, inflasi yang terjadi sampai dua digit, rendahnya pertumbuhan ekonomi, tingginya biaya impor minyak, dan hilangnya rasa percaya diri di kalangan bisnis.⁶ Kemudian masalah eksternal adalah Masyarakat Eropa mengalami resesi ekonomi sebagai akibat krisis minyak di tahun 1973 karena adanya Perang Arab-Israel, dan Revolusi Iran di tahun 1979.⁷

Berdasarkan kondisi-kondisi yang melingkupi Masyarakat Eropa, maka ME mulai memusatkan perhatian kepada hal-hal yang berhubungan dengan pencarian alternatif untuk meningkatkan kompetensi. Alternatif dilakukan melalui upaya pembaharuan kelembagaan masyarakat Eropa, termasuk implementasi demokratisasi dan kemungkinan perluasan.⁸ Diharapkan melalui cara-cara ini ekonomi Eropa akan terdongkrak kembali.

⁶ Ibid

⁷ Ibid

⁸ Ibid

Salah satu alternatif yang berkaitan dengan pembaharuan kelembagaan adalah integrasi ekonomi.

Upaya-upaya yang dilakukan ME untuk mengatasi masalah-masalahnya sebenarnya mengacu pada misi pokok Perjanjian Roma yaitu membangun pasar bersama berdasarkan kebebasan lalu lintas barang, modal, tenaga kerja, dan jasa.⁹ Namun, sampai pertengahan dekade 1980-an, pasar bersama berdasarkan empat kebebasan belum tercapai karena produk *market integration* atau akses sepenuhnya secara timbal balik ke pasar masing-masing negara anggota dan pengaruh pemerintah dalam kondisi yang kompetitif belum berjalan. Karena itu, ME mulai mencari hambatan-hambatan yang ada dalam Pasar Bersama dengan membentuk Komisi Khusus. Komisi Khusus mengusulkan untuk menghapuskan hambatan-hambatan non tarif dengan cara penerapan quota secara bilateral, *multi fibre agreement*, dan penurunan subsidi. Dalam rangka pencapaian program-program tersebut, Dewan Eropa menyetujui diselenggarakannya konferensi antarpemerintah untuk melakukan revisi Perjanjian Roma. Hasil revisi tersebut adalah disetujuinya Akta Tunggal Eropa (Desember 1985) dimana cakupannya tidak hanya pada kerjasama ekonomi saja, tetapi mereka mulai memasukkan dimensi politik. Masuknya dimensi politik dalam kerangka kebijakan ME sebenarnya sudah menjadi rencana mereka sejak awal berdirinya ECSC. Namun, pemicu utama yang mempercepat proses integrasi

⁹ Ibid hal.35

politik adalah terjadinya revolusi di Eropa Tengah dan Timur, serta bersatunya Jerman.¹⁰

Pada dasarnya integrasi ekonomi, politik, keamanan dan kebudayaan Uni Eropa dimaksudkan untuk meningkatkan kemakmuran atau kesejahteraan masyarakat Eropa serta menciptakan stabilitas kawasan sesuai dengan prinsip UE yaitu "*Peace, Prosperity, and Progress*". Sesuai dengan prinsip itu pulalah maka kedepannya organisasi ini berusaha untuk mencapai tujuan-tujuan seperti : pasar tunggal, euro-mata uang bersama, penegakan demokrasi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Jadi tujuan UE kedepannya ditekankan pada perlindungan terhadap kepentingan UE secara keseluruhan dan meliputi berbagai bidang termasuk pertahanan militer, serta menjamin pelaksanaan politik luar negeri masing-masing Negara anggota berdasarkan solidaritas dan loyalitas untuk mencapai keuntungan bersama.

Integrasi ekonomi, politik, keamanan dan budaya juga mendatangkan keuntungan, antara lain :

1. Semua warga Negara anggota UE sekaligus menjadi warga Negara Eropa berserta hak-haknya.
2. Bebas untuk hidup dan tinggal serta bekerja dimanapun diantara Negara-negara anggota yang berada dalam satu kawasan tanpa ada batasan kenegaraan.
3. Mempunyai hak pilih di Negara-negara anggota UE lainnya.
4. Mendapatkan hak pendidikan dan belajar di Negara manapun.

¹⁰Ibid hal.36

Keuntungan-keuntungan ini dapat berarti bahwa warga Negara antar sesama anggota misalnya warga Negara Italia dapat hidup dan bekerja di Jerman tanpa dikenai tuduhan pelanggaran batas wilayah atau kedaulatan. Contoh lainnya adalah warga Estonia dapat menggunakan kedutaan besar Italia di Argentina untuk mengurus segala keperluannya, karena Estonia tidak memiliki perwakilan diplomatik di Argentina.

Integrasi ekonomi UE juga menjadikan UE sebagai salah satu kekuatan ekonomi terkuat di dunia, sehingga UE dapat berperan dalam sistem ekonomi global dan dapat diperhitungkan dalam politik internasional. Dalam bidang multikulturisme, integrasi UE dalam berbagai bidang dapat memperkuat hubungan saling mendukung Negara-negara UE dalam organisasi internasional seperti PBB, dimana Negara UE seperti Inggris dan Perancis duduk sebagai anggota tetap Dewan Keamanan, dan Negara anggota lainnya yang duduk sebagai anggota tidak tetap DK PBB, serta mempunyai 27 suara di majelis umum. Hal-hal tersebut diatas memperkuat UE sebagai satu kesatuan integrasi ekonomi, politik dan militer yang patut diperhitungkan dalam dunia global.

B. Kerjasama Uni Eropa

Jatuhnya tembok berlin serta runtuhnya komunisme dan Uni Soviet (1989) serta Comecon merupakan awal yang menandai berakhirnya era panas di Eropa. Negara-negara di Eropa timur dan tenggara yang terlibat konflik menjadi ancaman bagi stabilitas Uni Eropa. Oleh karena itu, Uni Eropa pada masa ini mengalami dua tantangan yaitu tantangan manajemen krisis dan

tantangan sebagai penentu keberhasilan transformasi nilai ekonomi dan politik di Negara-negara konflik tersebut. Disini, Uni Eropa berperan sebagai stabilisator transformasi, dan juga berperan untuk menyediakan *soft-security* bagi negara-negara di Eropa timur dan tenggara tersebut. UE juga memberikan bantuan dan kerjasama dalam berbagai bidang, sehingga secara perlahan-lahan Negara-negara tersebut akan mempunyai sistem politik yang sama dengan UE.

Secara umum tujuan yang hendak dicapai dengan penyatuan ekonomi Eropa didasarkan pada tiga ketentuan¹¹;

1. Integrasi ekonomi yang didukung oleh *Customs Union* sejak awal berdirinya tiga organisasi UE (ECSC, EURATOM, EEC)
2. Kerjasama pembangunan ekonomi regional untuk membantu mempercepat pertumbuhan dan pembangunan di wilayah terbelakang di kawasan UE, yang didukung oleh bantuan ekonomi dan keuangan melalui dana struktural, seperti *social funds*, *grant*, *aid*, dan lainnya.
3. Kerjasama perdagangan dengan mengambil program Pasar Tunggal Eropa sebagai kegiatan utama.

Perluasan keanggotaan UE pada dasarnya disebabkan oleh beberapa hal antara lain :

1. Alasan ekonomi

Dengan adanya perluasan keanggotaan, berarti akan tercipta perluasan pasar, dan hal tersebut akan menguntungkan UE sebagai institusi yang dapat memperoleh keuntungan dalam bidang ekonomi.

¹¹ Ibid hal.42

2. Keamanan

Integrasi Negara-negara tersebut dapat menciptakan stabilitas kawasan. Hal ini akan memperkuat keamanan dan stabilitas Negara anggota yang juga dapat menstabilkan keamanan Eropa sebagai suatu kawasan yang dapat berperan dalam politik global sehingga dapat mempertahankan diri secara bersama dari ancaman yang datang.

3. Identitas

Integrasi tersebut untuk meyatukan persamaan sejarah dan budaya diantara Negara-negara Eropa. Sehingga dapat menciptakan suatu kesatuan yang terintegrasi.

Para pemimpin Eropa menyadari bahwa setelah terjadinya disintegrasi dalam sistem komunis Uni Soviet yang mendorong kebangkitan nasionalisme dan demokratisasi di negara-negara Eropa Timur dan Tengah, ME akan menjadi tumpuan dari negara-negara tetangga tersebut. Baik langsung maupun tidak, ME merasa bertanggung jawab terhadap keresahan sosial, ketidakstabilan ekonomi dan politik yang melanda dan politik yang melanda wilayah Eropa. Untuk itu, melalui Akta Tunggal Eropa, ME menyempurnakan perjanjian institusionalnya melalui kerjasama yang semakin terintegrasi dalam satu wadah yaitu perjanjian Maastricht, dengan tujuan kesatuan ME diperlukan dalam menghadapi resiko ketidakpastian situasi dunia yang dapat mengancam stabilitas Eropa.

a. Dimensi Ekonomi dalam Perjanjian Maastricht

Dimensi ekonomi dalam Perjanjian Maastricht merupakan hal yang paling mendasar dalam pembentukan Uni Eropa, karena cikal bakal

integrasi ME dimulai melalui kerjasama ekonomi. Kesuksesan kerjasama yang telah dibentuk ME melalui ECSC, EEC, dan EURATOM dalam bentuk kerjasama ekonomi telah memperkuat keinginan dan cita-cita bersama para politisi dan birokrat ME untuk menjadikan kawasan Eropa Barat sebagai kawasan ekonomi yang kuat sejak awal dekade 1990-an. Cita-cita ini terbukti dengan berhasilnya mereka merumuskan berbagai peraturan untuk menciptakan program Pasar Tunggal Eropa yang secara bertahap berlaku mulai 1 Januari 1993.¹²

Sampai saat ini Uni Eropa telah memiliki 27 negara anggota. Tujuan utama dibentuknya Uni Eropa adalah:

- 1) Membentuk hak-hak dan kewajiban-kewajiban kewarganegaraan Eropa (hak dasar, kebebasan untuk bergerak, hak-hak dalam bidang politik, dan hak dalam bidang sipil).
- 2) Menjamin kemerdekaan, keamanan, dan keadilan (kerjasama dalam bidang peradilan dan urusan dalam negeri).
- 3) Meningkatkan kelangsungan sosial dan ekonomi (Pasar Tunggal Eropa, euro sebagai mata uang umum di Eropa, menciptakan lapangan kerja, perkembangan wilayah, perlindungan wilayah).
- 4) Menetapkan peranan Eropa di dunia (keamanan menyeluruh dan kesatuan politik di luar negeri, Uni Eropa di dunia).

Penyatuan dalam bidang ekonomi dan moneter atau *Economic and Monetary Union* (EMU) menjadi bagian yang terpenting dalam integrasi Eropa khususnya bidang ekonomi, menurut Prof. Klaus¹³:

¹² Ibid hal.37

¹³ Ibid hal.43

- 1) Secara logis, suatu pasar membutuhkan satu mata uang.
- 2) Secara ekonomi, program EMU akan dapat mengurangi biaya transaksi dan dapat pula menekan risiko serendah mungkin dalam pembayaran.
- 3) Secara politik, disiplin yang ditekankan dan ditegakkan oleh *European Monetary System* (EMS) sebagai sistem dari EMU dapat mengingatkan para pemimpin politik di negara anggota untuk mendesak Bank Sentral Jerman keluar dari posisinya sebagai pemimpin dan penentu EMS.

b. Dimensi Politik dalam Perjanjian Maastricht

Dilandasi oleh kesadaran akan perlunya suatu iklim yang dapat memberikan jaminan bagi stabilitas politik, keamanan regional dan internasional dalam mewujudkan Eropa Bersatu, ME merasa membutuhkan suatu *framework* bagi perdamaian dan kemajuan di Eropa dalam hubungannya dengan pihak luar dengan memanfaatkan “pola integrasi ekonomi” yang telah berhasil terlebih dahulu.¹⁴

Pemikiran politis dengan mengacu kepada pola integrasi ekonomi sebenarnya telah lama menjadi cita-cita ME dan semakin terwujud dengan Perjanjian Maastricht yang diimplementasikan melalui *Common Foreign Security Policies* (CFSP). Selain itu, kebutuhan akan suatu “*framework*” kerjasama politik keamanan tersebut didorong oleh sejumlah faktor¹⁵, yaitu:

- 1) Meningkatnya pembangunan militer Uni Soviet.

¹⁴ Ibid hal.44

¹⁵ Ibid hal.45

- 2) Adanya ketegangan antara pemerintah Amerika Serikat di bawah Reagan dengan sekutu-sekutu Eropa AS mengenai pembangunan *Strategic Defense Initiative* yang dilakukan AS tanpa konsultasi dengan Eropa.
- 3) Adanya keinginan dari Prancis khususnya, untuk tetap mendudukkan Jerman agar tetap berada di lingkungan aliansi Barat terutama dalam kaitan meningkatnya sentimen netral dan antinuklir.
- 4) Adanya keinginan dari Inggris dan Jerman untuk melibatkan Prancis lebih dekat dalam upaya Eropa Barat dalam bidang pertahanan.
- 5) Meningkatnya biaya dalam pembuatan dan pengembangan persenjataan.

Dalam kaitan ini, ada dua manfaat penting yang dipetik ME dengan pembentukan kerangka kerjasama keamanan tersebut¹⁶, yaitu;

- 1) Dapat membentuk atau menciptakan suatu rasa identitas bersama Eropa atau seperti kata Menlu Jerman menciptakan rasa patriotisme Eropa.
- 2) Dengan pendekatan bersama terhadap keamanan Eropa berarti dapat memiliki kapabilitas untuk melakukan tekanan secara kolektif terhadap pihak ketiga, serta dapat meningkatkan kapabilitas bagi ME untuk bertindak dan menjaga kepentingan Eropa.

Semenjak berlakunya Perjanjian Maastricht, dimensi politik di tubuh Uni Eropa menjadi suatu yang dibutuhkan untuk¹⁷;

¹⁶ Ibid

¹⁷ Ibid hal.46

- 1) Mengurangi resiko ketidakpastian yang dapat mengancam integritas teritorial dan kebebasan politik UE dan anggota-anggotanya, sifat demokratisnya, stabilitas ekonominya serta stabilitas negara-negara tetangga.
- 2) Dari sudut pandang politik, integrasi Eropa ditujukan untuk membentuk Eropa Barat sebagai suatu kesatuan politik.
- 3) Suatu politik luar negeri dan keamanan bersama Eropa perlu dikembangkan untuk menengahi konflik yang terjadi di wilayah-wilayah yang tidak terjangkau oleh kekuatan NATO.

Dalam Uni Eropa terdapat lima lembaga utama, yaitu;

- a) Parlemen Eropa, dipilih lima tahun sekali yang fungsinya mengeluarkan mayoritas undang-undang di Eropa yang berlaku bagi warga negara.
- b) Dewan Uni Eropa, dipimpin oleh para kepala negara atau kepala pemerintahan negara-negara anggota secara bergiliran dengan periode enam bulan dan dewan bertemu minimal sekali dalam setahun. Dewan ini membahas berbagai hal agenda seperti urusan kebijakan luar negeri, keuangan, pendidikan, dan telekomunikasi. Dewan ini memainkan peranan besar dalam memberikan arahan kebijakan dalam setiap aktivitas Uni Eropa.
- c) Komisi Eropa. Presiden dan para anggota Komisi Eropa ditunjuk oleh pemerintah negara-negara anggota setelah mendapat persetujuan dari parlemen Eropa. Komisi Eropa mempunyai otoritas dalam mewakili

Uni Eropa di tingkat internasional terutama dalam bidang kerjasama dan perdagangan.

- d) Lembaga Peradilan. Lembaga ini terdiri dari 15 hakim dan 18 pengacara umum yang ditunjuk atas persetujuan bersama pemerintah negara-negara anggota dan memegang masa jabatan selama tiga tahun. Peran Lembaga Peradilan adalah menjamin penerapan hukum dalam masyarakat agar dapat berlangsung dengan baik dan mencapai sasarannya.
- e) Lembaga Pemeriksa Keuangan. Lembaga ini terdiri dari 15 anggota yang berasal dari 15 negara anggota dan ditunjuk setiap enam tahun sekali. Tugas utamanya adalah memeriksa jumlah rekening keuangan dan penggunaan anggaran Uni Eropa dan membuat pengumuman pada seluruh warga negara Eropa tentang penggunaannya.

Selain lima lembaga utama di atas, Uni Eropa juga memiliki lima lembaga lain yang menjadi bagian dari sistem kelembagaan tersebut. Lembaga-lembaga tersebut adalah;

- i) Komite Sosial dan Ekonomi Eropa atau *European Economic and Social Committee* (EECS). Komite ini dibentuk untuk mewakili berbagai kepentingan kelompok masyarakat sipil yang berhubungan dengan Komisi, Dewan, dan Parlemen Eropa. Komite Ekonomi dan Sosial bukan merupakan lembaga Uni Eropa yang dimaksud dalam pasal 4 Traktat Uni Eropa yaitu, Parlemen, Dewan, Komisi, Mahkamah Eropa, dan *Court of Auditors*. Komite Ekonomi dan Sosial beranggotakan 222 orang dengan

masa jabatan 4 tahun, terdiri dari 24 anggota dari Jerman, Inggris, Prancis, dan Italia; 21 anggota dari Spanyol; 12 anggota dari Austria, Belgia, Yunani, Belanda, Portugal dan Swedia, 9 orang dari Denmark, Finlandia, dan Irlandia serta 6 pakar dari Luksembourg. Keanggotaan komite ditunjuk oleh dewan berdasarkan daftar calon yang diajukan oleh masing-masing negara anggota. Komite berwenang menyampaikan opini dan informasi kepada lembaga-lembaga pengambil keputusan di bidang ekonomi dan sosial.¹⁸

- ii) Komite Wilayah. Komite ini bertugas menangani hal-hal yang berhubungan dengan kebijakan regional, lingkungan, dan pendidikan.
- iii) Ombudsman Eropa. Badan ini bertugas menyelidiki dan melaporkan administrasi dalam institusi-institusi dan badan-badan masyarakat Eropa seperti Komisi Eropa, Dewan Uni Eropa, dan Parlemen Eropa.
- iv) Bank Investasi Eropa. Badan ini merupakan lembaga keuangan Uni Eropa yang memberikan bantuan pada proyek-proyek investasi yang dikonstrubusikan bagi integrasi, keseimbangan pertumbuhan ekonomi dan sosial yang kohesif antar negara-negara anggota Uni Eropa.

Bank Sentral Eropa. Memiliki fungsi yang dikenal dengan istilah “Sistem Euro” yaitu merumuskan definisi dan penerapan kebijakan keuangan di wilayah Euro, memimpin operasi-operasi perdagangan dengan luar negeri, dan meningkatkan lancarnya sistem pembayaran sesuai mata uang UE.

¹⁸ Poedji Koentarlo. 1999. *Uni Eropa dengan Dinamikanya Dikaitkan dengan Kepentingan Indonesia di Eropa*, ditujukan untuk Perutusan RI untuk Masyarakat Eropa Brussel. Jakarta, hal.56.

Uni Eropa merupakan sebuah organisasi internasional yang tidak hanya merupakan wadah dari negara-negara yang berdekatan secara geografis. Selain merupakan sebuah organisasi regional, Uni Eropa dikenal sebagai organisasi yang menuju pada lembaga supranasional yang memiliki legitimasi kuat untuk mengatur negara-negara anggotanya. Sejarah panjang pembentukan Uni Eropa dimulai dari pembentukan *European Coal and Steel Community* (ECSC), *European Economic Community* (EEC) dan *European Atomic Community* (Euratom). Ketiganya kemudian melalui proses dan tahapan sehingga membentuk Uni Eropa seperti saat ini.

Uni Eropa sampai saat ini beranggotakan 27 negara. Keunikannya adalah setiap negara anggotanya memiliki independensi tetapi tetap tunduk pada keputusan-keputusan Uni Eropa. Beberapa poin menjadi syarat yang diterapkan oleh Uni Eropa ketika sebuah negara ingin menjadi anggotanya, antara lain yaitu: memiliki demokrasi yang stabil yang menjamin supremasi atau kepastian hukum, adanya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dan kaum minoritas, memiliki ekonomi pasar terbuka, dan menerapkan administrasi publiknya berdasarkan undang-undang yang telah ditetapkan oleh Uni Eropa.

Uni Eropa dalam menjalankan tugasnya terdiri atas struktur organisasi atau badan-badan utama sebagai berikut:

- a) *European Commission* atau Komisi Eropa, merupakan badan eksekutif dari Uni Eropa yang bersifat independen dan bertugas membuat rancangan undang-undang, selain itu komisi merepresentasikan Uni

Eropa secara global, dalam hal ini contohnya adalah menegosiasikan persetujuan antara Uni Eropa dengan negara lain.¹⁹

- b) *European Parliament* atau Parlemen Eropa, anggotanya dipilih setiap lima tahun sekali. Parlemen Eropa ini memiliki kekuasaan legislasi dan memiliki kewenangan untuk menentukan anggaran Dewan Eropa serta dapat merubah ataupun menolaknya.
- c) *European Council* atau Dewan Uni Eropa, bertugas sebagai badan representatif keluar pada isu-isu keamanan.²⁰ Selain itu berbagi tugas dan tanggung jawab dengan parlemen dalam menyetujui undang-undang, dengan komisi mengatur prioritas dan tujuan Uni Eropa secara umum.
- d) *European Court of Justice*, merupakan mahkamah Eropa yang bertugas menentukan aturan-aturan yang tidak sesuai dengan Traktat Roma.
- e) *The Council of Ministers*, memungkinkan pemerintahan dari negara anggota ikut serta dalam pengambilan keputusan di Uni Eropa.
- f) *The European Central Bank* atau Bank Sentral Eropa, berperan sebagai pengendali “eurosystem” yaitu sistem mata uang tunggal Eropa.

Uni Eropa sebagai lembaga supranasional yang merupakan organisasi antar pemerintah memiliki legitimasi yang cukup kuat untuk mempengaruhi kondisi politik dari negara-negara anggotanya. Tidak

¹⁹European Union. *European Commission: Purpose*, http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/european-commission/index_en.htm, diakses pada 3 Februari 2015

²⁰European Union. *EU Presidents: who does what ?*, http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/eupresidents/index_en.htm, diakses pada 3 Februari 2015

diragukan lagi bahwa Uni Eropa merupakan organisasi yang paling berpengaruh di kawasan Eropa. Hal ini terlihat bahwa tidak hanya terbatas pada negara-negara anggotanya, Uni Eropa memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap negara-negara lain di kawasannya yang bukan merupakan anggotanya. Tujuan Uni Eropa untuk menciptakan kemajuan perkembangan politik dan ekonomi bagi negara anggotanya untuk mencapai pembangunan yang seimbang dan berkelanjutan, menjadi tanggung jawab yang cukup besar bagi organisasi tersebut.

Uni Eropa memiliki kelebihan yaitu mampu menarik negara-negara di kawasan Eropa untuk ingin bergabung dalam organisasi ini. *Hard power* yang dimiliki Uni Eropa yaitu merupakan tindakan nyata yang memaksa dan memiliki sanksi dalam penegakan hukum atau aturannya, sedangkan *soft power* nya adalah hal tidak terlihat secara nyata tapi sifatnya mengikat anggota Uni Eropa yaitu adanya ideologi dan kebudayaan yang sama. Contoh yang terlihat misalnya Turki yang menginginkan keanggotaan Uni Eropa. Turki memandang Uni Eropa sebagai sebuah kekuatan yang besar dan akan membawa dampak positif jika menjadi anggotanya. Sebagai sebuah organisasi internasional, tentunya Uni Eropa tidak akan berdiam diri menyaksikan konflik-konflik yang terjadi di sekitarnya baik pada level regionalnya, maupun global.

Uni Eropa menjalin hubungan diplomatik dengan hampir semua negara di dunia. Uni Eropa memiliki kemitraan strategis dengan para aktor utama di internasional, memiliki hubungan baik dengan negara-negara

berkembang di seluruh dunia, dan telah menandatangani perjanjian kerjasama bilateral dengan sejumlah negara di sekitarnya. Di luar negeri, Uni Eropa diwakili oleh suatu jaringan yang terdiri dari 136 Delegasi Uni Eropa, yang memiliki fungsi yang serupa dengan kedutaan besar. Berikut ini adalah beberapa contoh yang mengilustrasikan apa yang dilakukan oleh Uni Eropa di seluruh dunia, untuk melindungi kepentingan Eropa dan mempromosikan nilai-nilainya:²¹

- 1) Uni Eropa memberi dukungan stabilitas di negara-negara Balkan. Proyek-proyek bantuan di tujuh negara mendapatkan bantuan dana dari Uni Eropa untuk membantu pembangunan masyarakat yang stabil. Di Kosovo, Uni Eropa menurunkan pasukan peradilan dan polisi berkekuatan 1900 personil untuk membantu menegakkan aturan hukum. Negara-negara di bagian barat Balkan telah menjadi kandidat atau calon kandidat anggota Uni Eropa sebagai bagian dari kebijakan perluasannya.
- 2) Uni Eropa adalah anggota dari Kuartet, bersama dengan PBB, Amerika Serikat dan Rusia, yang berupaya untuk mendorong terciptanya perdamaian di Timur Tengah. Penyelesaian konflik Arab-Israel merupakan prioritas strategis bagi Eropa. Tujuan Uni Eropa adalah solusi dua negara di mana Negara Palestina yang merdeka, demokratis

²¹Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia, Brunei Darussalam, dan ASEAN. *Apa Kegiatan Kami?*, <http://eeas.europa.eu/delegations/indonesia/>, diakses pada 4 Februari 2015

dan berkesinambungan hidup berdampingan dengan Israel dan negara-negara tetangga lainnya.

- 3) Uni Eropa menawarkan kepada negara-negara tetangganya suatu hubungan istimewa yang disusun dalam Kebijakan Kawasan Eropa (*European Neighbourhood Policy*). Kebijakan ini dirancang untuk memperkuat kesejahteraan, keamanan dan stabilitas semua mitra dan menghindari timbulnya garis pemisah baru antara Uni Eropa yang telah diperluas dengan negara-negara di kawasan Mediterania selatan, Eropa Timur dan Kaukasus Selatan.
- 4) Uni Eropa turut serta dalam perundingan Protokol Kyoto tentang Perubahan Iklim dan, dengan meluncurkan suatu agenda domestik untuk karbon rendah yang mungkin merupakan yang paling canggih dan paling maju di dunia, terus menjadi pelaku penting terkait isu ini, sehingga berperan besar dalam mendorong suatu agenda yang ambisius untuk perubahan. Uni Eropa memusatkan perhatiannya pada upaya untuk membangun suatu koalisi untuk suatu kesepakatan yang mengikat secara hukum tentang perubahan iklim.
- 5) Uni Eropa menjalin kerjasama erat dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam berbagai masalah. Keyakinan Uni Eropa tentang multilateralisme mencerminkan keterikatan dengan peraturan mengikat berdasarkan perundingan dalam hubungan internasional, dan secara tegas dituangkan dalam Traktat Lisabon. Apabila memungkinkan, Uni Eropa berupaya untuk menggantikan atau menurunkan kadar politik

kekuasaan dengan aturan-aturan dan norma-norma, sehingga membuat hubungan internasional lebih serupa dengan tatanan domestik: lebih damai dan terkirakan.

- 6) Uni Eropa menjalankan misi-misi militer, politik atau sipil untuk membantu dalam upaya membangun dan menjaga perdamaian di sejumlah negara di Eropa, Afrika dan kawasan lain, seperti di Afghanistan.
- 7) Uni Eropa berkomitmen terhadap hak asasi manusia dan berupaya untuk memastikan bahwa hak asasi manusia dihormati di seluruh dunia. Uni Eropa telah menjadikan hak asasi manusia sebagai suatu aspek sentral dari hubungan luar negerinya: dalam dialog-dialog politik yang dilakukannya dengan negara-negara yang bukan anggota Uni Eropa melalui kebijakan pembangunan dan bantuannya atau melalui tindakannya dalam forum-forum multilateral, seperti PBB.
- 8) Uni Eropa bertindak sebagai pelaku tunggal dalam perdagangan luar negeri dan mendukung prinsip-prinsip perdagangan internasional yang bebas dan adil. Berhubung Uni Eropa bernegosiasi dengan satu suara, Uni Eropa dapat memberikan pengaruh yang nyata. Secara bersama-sama, 27 negara anggota Uni Eropa menguasai 19 persen dari ekspor dan impor dunia. Karena norma-norma teknisnya dipergunakan secara luas di seluruh dunia, Uni Eropa seringkali menentukan aturan perdebatan.

- 9) Uni Eropa mendukung pembangunan sosial dan ekonomi negara-negara mitranya, dan siap untuk membantu apabila negara-negara tersebut mengalami bencana. Secara bersama-sama, Uni Eropa dan negara-negara anggotanya merupakan donor terbesar di dunia untuk pembangunan dan bantuan kemanusiaan. Kontribusinya mencapai 60 persen dari bantuan pembangunan resmi di dunia.
- 10) Uni Eropa siap menghadapi tantangan untuk mengelola isu-isu ekonomi dan keuangan internasional, misalnya dalam konteks G-20. Uni Eropa memberi kontribusi untuk upaya yang sedang berlangsung untuk mereformasi lembaga-lembaga keuangan internasional, seperti Bank Dunia dan IMF serta mengatur ulang sektor keuangan internasional. Mata uang bersama, yaitu euro, memberikan pengaruh tambahan atas wilayah euro dan Bank Sentral Eropa.

Upaya untuk menjadi penengah dalam konflik yang terjadi antara Rusia dan Georgia, bukan merupakan satu-satunya yang pernah dilakukan. Uni Eropa juga berperan dalam beberapa konflik seperti konflik antara Serbia dan Kosovo, Bosnia-Herzegovina, serta konflik separatisme Transnistria Moldova. Konflik yang terjadi di Moldova, misalnya merupakan bentuk lain dari konflik yang terjadi di negara tetangga Uni Eropa.

Moldova adalah negara yang terletak di wilayah Eropa Timur, tepatnya di sebelah timur laut Rumania. Pada mulanya, Moldova merupakan bagian dari Rumania. Moldova kemudian bergabung dengan

Uni Soviet ketika akhir Perang Dunia II, hingga akhirnya memutuskan untuk melepaskan diri dan mendeklarasikan kemerdekaannya pada Agustus 1991. Namun sejak tahun 1989, muncul konflik separatisme yang dilakukan oleh gerakan yang menamakan diri mereka *Pridnestrovian Moldavian Soviet Socialist Republic*, yang tempat tinggalnya di wilayah Transnistrian, wilayah ini terletak di antara sungai Dniester dan perbatasan Ukraina. PMR (*Pridnestrovian Moldavian Republic*) adalah pemerintahan di daerah pecahan Transnistria yang kekuasaannya tidak diakui oleh pemerintah Moldova. Uni Eropa meyakini bahwa PMR diuntungkan dengan adanya transaksi ilegal, baik senjata maupun barang-barang lainnya yang diperjualbelikan secara gelap, selama konflik berlangsung. Oleh karena itu pada tahun 2004 Uni Eropa menjalankan prosedur *double check* terhadap impor baja dari Moldova, yang bertujuan untuk menekan eksplorasi pertambangan di Transnistria oleh PMR. Kemudian impor baja dari wilayah tersebut tidak akan diterima oleh Uni Eropa tanpa ada persetujuan dan pengakuan dari pemerintah Moldova.

Penyebab munculnya gerakan ini adalah kekhawatiran minoritas yang berbahasa Rusia atas kebijakan pemerintah Moldova menjadikan bahasa Rumania sebagai bahasa utama. Mereka menaruh curiga bahwa pemerintah sedang berupaya untuk bergabung kembali dengan Rumania dan memilih untuk mendeklarasikan wilayah Transnistria dengan nama *Pridnestrovian Moldavian Republic* (PMR). Konflik ini juga menarik perhatian PBB dan melibatkan banyak pihak lainnya, seperti Ukraina, Rusia, dan *Organization for Security and Cooperation in Europe* (OSCE).

Permasalahan konflik ini tidak kunjung selesai dan perundingan menemui jalan buntu. Pada tahun 2005, pemerintah Moldova meminta bantuan Uni Eropa untuk menyelesaikan konflik yang telah menahun ini. Menanggapi permintaan Moldova, *European Council* mengirimkan perwakilan khusus Uni Eropa di Moldova.

Uni Eropa sendiri mulai memperlihatkan kebijakan luar negeri terhadap kasus Transnistria pada tahun 2002, di mana sejak saat itu, isu konflik tersebut seringkali diangkat saat berhubungan dengan Rusia dengan Ukraina. Resolusi konflik di wilayah tersebut menjadi perhatian Uni Eropa karena dianggap sebagai sebuah penyelesaian hambatan bagi *EU Enlargement Vision* yang terdapat di dalam *EU Commission Paper* yang ditujukan kepada Moldova di tahun 2002. Dalam tulisan tersebut dijelaskan bagaimana konflik tersebut tidak melibatkan tindak kekerasan terorisme atau perusakan lingkungan, akan tetapi lemahnya pemerintahan Moldova dianggap sebagai penyebab tidak selesainya konflik Transnistria. Pada tahun 2003, Uni Eropa dan NATO di bawah Amerika Serikat menjadi pihak ketiga yang ditunjuk langsung oleh Moldova dalam mediasi resolusi konflik tersebut.²² Uni Eropa selanjutnya melakukan berbagai upaya, termasuk bekerjasama dengan Amerika Serikat guna menjadi

²²Nicu Popescu. *The EU in Moldova-Settling Conflicts in the Neighborhood*. 2005, hal.9, <http://www.iss.europa.eu/uploads/media/occ60.pdf>, diakses pada 4 Februari 2015

observer dan membentuk *EU Border Assistance Mission* (EUBAM) di wilayah tersebut.²³

Pada Maret 2005, Uni Eropa akhirnya mengirimkan perwakilan melalui mekanisme *European Union Special Representatives* (EUSR).²⁴ Uni Eropa memiliki kepentingan untuk memenuhi tujuannya yaitu menstabilkan, mengamankan, memakmurkan, dan menciptakan iklim atau lingkungan yang demokratis. Dalam upayanya untuk menciptakan hal tersebut, maka Uni Eropa harus membuat perjanjian *Common Foreign and Security Policy* (CFSP) yang lebih mengikat dan lebih kuat. Berkontribusi dalam resolusi konflik di dalam ruang lingkup Uni Eropa adalah kunci untuk mencapai tujuan-tujuan Uni Eropa.

²³Daria Isachenko, 2010. *The EU Border Mission at Work Around Transdnistria: a win-win case?*, *Societes Politiques Comparees*, hal. 2

²⁴*Ibid*